

BAB 1
PENDAHULUAN
IMPLEMENTASI INFRASTRUKTUR INKLUSI
RESPONSIF GENDER PADA KAWASAN GEDUNG
SMP SEKOLAH RAKYAT SEMARANG

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan bangunan gedung di Indonesia diatur melalui PP Nomor 16 Tahun 2021 sebagai peraturan pelaksana UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, yang mengklasifikasikan bangunan berdasarkan fungsinya serta menetapkan standar teknis mencakup aspek tata bangunan (arsitektur, peruntukan, dan intensitas bangunan) dan keandalan bangunan (keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan). Regulasi ini juga mengatur standar desain yang mempertimbangkan ketahanan gempa, kondisi geologis-geografis, serta efisiensi konstruksi (Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, 2021).

Isu ini menjadi semakin relevan dalam konteks pendidikan. Selama ini, pemerataan pendidikan lebih menitikberatkan pada aspek non-fisik seperti kurikulum dan beasiswa, sementara aspek infrastruktur fisik kerap diabaikan. Padahal, desain ruang yang tidak sensitif terhadap kebutuhan gender dan fisik dapat menjadi bentuk eksklusi terselubung, contohnya ketiadaan sanitasi responsif gender (toilet aman untuk manajemen kebersihan menstruasi) yang berkontribusi pada tingginya absensi hingga putus sekolah remaja putri, serta keterbatasan aksesibilitas fisik (*ramp*, *guiding block*) yang menghambat kemandirian anak disabilitas. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan teknis umum dalam PP 16/2021 dengan kebutuhan aktual perencanaan infrastruktur sekolah yang responsif gender dan inklusif, sebagaimana juga diamanatkan Permen PUPR No. 14/PRT/M/2017 mengenai pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Persoalan ini semakin penting dikaji pada konteks Sekolah Rakyat, program pendidikan yang menyasar anak dari keluarga kurang mampu dan kelompok rentan,

dengan populasi yang lebih heterogen dan rentan terhadap eksklusi. Pemenuhan hak atas pendidikan di sini tidak hanya soal akses belajar-mengajar, tetapi juga lingkungan fisik yang aman dan ramah bagi seluruh pengguna.

Kajian terdahulu terkait responsif gender (Esariti dkk., 2020; Listyaningsih dkk., 2018) menunjukkan variasi tingkat responsivitas gender pada fasilitas publik perkotaan, namun belum menyentuh kawasan pendidikan. Kajian mengenai Sekolah Rakyat (Rizqillah & Ulum, 2025) juga masih berfokus pada aspek kebijakan dan pemberdayaan sosial, belum menjangkau aspek fisik bangunan. Pada level internasional, laporan World Bank (2024) dan UN Women (2019) menegaskan pentingnya integrasi gender dan disabilitas dalam desain fasilitas pendidikan, namun konteksnya berskala kebijakan global yang belum tentu relevan dengan regulasi teknis dan karakteristik Sekolah Rakyat di Indonesia. (Esariti et al., 2020) (Listyaningsih et al., 2018).

Berdasarkan pemetaan tersebut, teridentifikasi tiga kesenjangan penelitian: (1) secara tematik, kajian responsif gender di Semarang berfokus pada ruang publik, belum kawasan pendidikan; (2) secara substansi, kajian Sekolah Rakyat masih berorientasi kebijakan, belum aspek fisik bangunan; (3) secara kontekstual, kajian internasional belum dikontekstualisasikan pada regulasi nasional dan studi kasus Sekolah Rakyat.

Ketiga kesenjangan ini menjadi dasar kebaruan penelitian, yaitu mengintegrasikan ketentuan teknis PP 16/2021, prinsip infrastruktur responsif gender, dan konteks spesifik Sekolah Rakyat Semarang dalam satu kerangka analisis. Penelitian ini bermaksud mengkaji implementasi infrastruktur inklusif dan responsif gender pada kawasan tersebut, guna menggambarkan sejauh mana infrastruktur mendukung pemenuhan hak pendidikan bagi kelompok rentan, sekaligus memberikan rekomendasi perencanaan yang lebih inklusif, aman, dan berkeadilan gender.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi eksisting infrastruktur fisik pada kawasan pendidikan Sekolah Rakyat Semarang ditinjau dari ketentuan teknis bangunan gedung

sebagaimana diatur dalam PP 16/2021, khususnya pada aspek tata bangunan dan keandalan bangunan (keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan), yang mencakup variabel: (a) *ramp* atau jalur landai, (b) toilet bagi kelompok rentan dan berkebutuhan khusus, (c) fasilitas bagi anak-anak pada toilet, (d) wastafel atau tempat cuci tangan, (e) rambu dan marka, (f) ruang laktasi dan ruang khusus lainnya, (g) pegangan tangan (*handrail*), (h) kamera pengawas (*CCTV*), (i) alat pemadam api ringan (APAR), dan (j) jalur evakuasi serta titik kumpul?

2. Sejauh mana infrastruktur pada kawasan pendidikan Sekolah Rakyat Semarang telah memenuhi prinsip-prinsip infrastruktur responsif gender, khususnya pada aspek aksesibilitas bagi peserta didik, guru dan staf difabel, serta rasa aman dan kenyamanan pengguna perempuan dan kelompok rentan lainnya berdasarkan aspek aksesibilitas?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan mendeskripsikan kondisi eksisting infrastruktur fisik pada kawasan pendidikan Sekolah Rakyat Semarang ditinjau dari ketentuan teknis bangunan gedung sebagaimana diatur dalam PP 16/2021, khususnya pada aspek tata bangunan dan keandalan bangunan (keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan), yang mencakup variabel: (a) *ramp* atau jalur landai, (b) toilet bagi kelompok rentan dan berkebutuhan khusus, (c) fasilitas bagi anak-anak pada toilet, (d) wastafel atau tempat cuci tangan, (e) rambu dan marka, (f) ruang laktasi dan ruang khusus lainnya, (g) pegangan tangan (*handrail*), (h) kamera pengawas (*CCTV*), (i) alat pemadam api ringan (APAR), dan (j) jalur evakuasi serta titik kumpul.
2. Mengukur dan menganalisis tingkat pemenuhan infrastruktur pada kawasan pendidikan Sekolah Rakyat Semarang terhadap prinsip-prinsip infrastruktur responsif gender, khususnya pada aspek aksesibilitas bagi peserta didik, guru dan staf difabel, serta rasa aman dan kenyamanan pengguna perempuan dan kelompok rentan lainnya, pada kesepuluh variabel fasilitas penunjang tersebut, sehingga dihasilkan nilai/kategori tertentu sebagai *output* penelitian (bersifat

evaluatif-deskriptif).

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan di bidang perencanaan wilayah dan kota serta arsitektur, khususnya pada kajian integrasi antara regulasi teknis bangunan gedung (PP 16/2021) dengan prinsip infrastruktur responsif gender pada konteks fasilitas pendidikan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat mengisi kesenjangan literatur (research gap) yang selama ini memisahkan kajian responsif gender pada ruang publik perkotaan, kajian aksesibilitas difabel, dan kajian kebijakan Program Sekolah Rakyat, menjadi satu kerangka analisis yang utuh dan terintegrasi.
3. Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan akademik dan pijakan awal (baseline study) bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang mengkaji infrastruktur pendidikan responsif gender pada program Sekolah Rakyat di kota atau wilayah lain di Indonesia..

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi pengelola dan penyelenggara Sekolah Rakyat Semarang hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi kondisi infrastruktur eksisting serta masukan konkret dalam perbaikan atau penyempurnaan fasilitas fisik sekolah agar lebih inklusif dan responsif gender..
2. Bagi akademisi dan mahasiswa penelitian ini dapat menjadi contoh penerapan kajian regulasi teknis bangunan gedung yang dipadukan dengan perspektif gender dalam studi perencanaan infrastruktur pendidikan.
3. Bagi akademisi dan mahasiswa penelitian ini dapat menjadi contoh penerapan kajian regulasi teknis bangunan gedung yang dipadukan dengan perspektif gender dalam studi perencanaan infrastruktur pendidikan.

1.5 Batasan Penelitian

1.5.1 Batasan Lokasi

Penelitian ini dibatasi pada kawasan pendidikan Sekolah Rakyat Jawa Tengah 2 yang berlokasi di Jalan Kedungsari Raya Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Apabila terdapat lebih dari

satu unit Sekolah Rakyat di Kota Semarang, penelitian akan difokuskan pada unit/lokasi tertentu yang dipilih berdasarkan pertimbangan aksesibilitas data dan kelengkapan sarana-prasarana yang dapat diamati. Penelitian ini difokuskan pada kawasan gedung SMP Sekolah Rakyat Jawa Tengah 2, Kota Semarang

1.5.2 Batasan Substansi/Materi.

1. Penelitian ini dibatasi pada aspek fisik infrastruktur dan lingkungan terbangun (*built environment*) kawasan pendidikan, tidak mencakup aspek non-fisik seperti kurikulum, metode pembelajaran, kompetensi tenaga pendidik, atau pembiayaan operasional sekolah.

2. Ketentuan teknis bangunan gedung yang menjadi acuan analisis dibatasi pada aspek tata bangunan (arsitektur, peruntukan dan intensitas bangunan) serta keandalan bangunan gedung (keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan) sebagaimana diatur dalam PP 16/2021, tidak mencakup ketentuan bangunan gedung di atas/di dalam tanah dan air, maupun ketentuan desain prototipe/purwarupa secara mendalam.

3. Prinsip infrastruktur responsif gender yang dikaji dibatasi pada aspek: (1) *Ramp*; (2) Toilet Difabel; (3) Fasilitas Bagi Anak-anak Pada Toilet; (4) *Wastafel*; (5) Rambu dan marka; (6) Ruang Laktasi dan ruang khusus lainnya; (7) *Handrail*; (8) *CCTV*; (9) Alat Pemadam Api Ringan; (10) Jalur Evakuasi; bagi kelompok rentan. Aspek responsif gender di luar cakupan tersebut, seperti kurikulum berperspektif gender atau pelatihan kesetaraan gender bagi tenaga pendidik, berada di luar ruang lingkup penelitian ini.

4. Pada penelitian ini dibatasi berdasarkan hasil kuisioner dari 22 sumber yang terbagi dari 16 guru/staff dan 6 penyedia jasa konstruksi. Kami memilih 16 responden yang terdiri dari guru dan staf tersebut karena hasil diskusi dengan kepala sekolah, dan 6 penyedia jasa konstruksi karena responden tersebut memiliki pandangan tersendiri terhadap objek penelitian.

5. Analisis tingkat pemenuhan fasilitas aksesibilitas dan responsif gender dilakukan dengan metode *purposive sampling* yang dilakukan dengan 22 responden yang diambil pada proyek Sekolah Rakyat Jawa Tengah 2, Kota Semarang. Data yang kami gunakan dikumpulkan selama periode magang.

1.5.3 Batasan Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif dan pengambilan data berdasarkan observasi lapangan, dokumentasi, dan wawancara terbatas pada pihak pengelola dan pengguna kawasan Sekolah Rakyat Semarang. Penelitian tidak dimaksudkan untuk melakukan pengujian struktur teknis bangunan secara mendalam (seperti uji kekuatan konstruksi atau uji ketahanan gempa), melainkan berfokus pada penilaian kesesuaian fungsi dan tata ruang terhadap ketentuan regulasi dan prinsip responsif gender.

1.5.2 Batasan Waktu

Data dan kondisi infrastruktur yang dianalisis merupakan kondisi pada saat penelitian dilakukan (*existing condition*), sehingga rekomendasi yang dihasilkan bersifat kontekstual terhadap kondisi tersebut dan dapat berubah apabila terjadi perubahan fisik bangunan atau kebijakan Program Sekolah Rakyat di kemudian hari.